

**PENGURUS DANANTARA
KEBAL HUKUM?**

(Draf RUU BUMN)

Pasal 3Y

○ Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan pegawai BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan empat poin:

Pertama, kerugian BPI Danantara bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Kedua, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

Ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi.

Keempat, tidak memperoleh kepentingan pribadi secara tidak sah.

Pasal 9F

○ Direksi BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

○ Selain itu, direksi BUMN harus membuktikan tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi.

○ Terakhir, direksi BUMN juga harus membuktikan telah meng-ambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

○ Untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, persyaratan khusus yang wajib dipenuhi agar terhindari dari pertanggungjawaban hukum ialah membuktikan bahwa telah memberikan nasihat kepada direksi BUMN untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

HURU-HARA DANANTARA
Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN

Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang baru akan diresmikan 24 Februari 2025 sudah memicu huru-hara terutama di media sosial. Viral ajakan menarik uang dari bank-bank BUMN, sebagai bentuk protes terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) tersebut. Kekhawatiran masyarakat adalah badan tersebut akan berakhir seperti kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengguncang Malaysia. Skandal mega-korupsi yang mengguncang Negeri Jiran tersebut merugikan negara hingga Rp177 triliun. Tak hanya itu, Perdana Menteri-nya yaitu Najib Razak terseret dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Opini negatif publik Indonesia terhadap pembentukan Danantara menguat usai Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga salah satunya mengalir ke superholding BUMN ini. Diketahui, total efisiensi anggaran yang ditarget Prabowo US\$44 miliar atau Rp750 triliun. Sebanyak US\$20 miliar atau Rp325 triliun akan diserahkan ke Danantara. Pandangan warganet makin bergerak liar saat Revisi Undang-undang BUMN mengatur bahwa pengurus dan pegawai BPI Danantara dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian. Padahal Danantara akan mengelola 3 bank pelat merah yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI. Selain itu juga Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi) serta Mind ID (pertambangan). Dengan total aset kelolaan awal mencapai Rp9,4 ribu triliun atau sekitar US\$600 miliar. Bila diurus dengan benar, maka tujuan investasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia bakal tercapai. Tapi jikalau 'mbleset' siapa yang bakal bertanggung jawab?

Baca Hal 11....

Rusaknya Fasilitas di Laga Persela vs Persijap

Bola dan kerusuhan belum bisa dipisahkan dalam laga di negeri ini. Terbaru, duporter Persela Lamongan memasuki lapangan pada pertandingan Liga 2 melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center, Tuban, Jawa Timur, Selasa (18/2/2025). Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial, sejumlah oknum suporter merusak fasilitas stadion. Pertandingan pun berhenti. Belum jelas kapan laga ini bisa dilanjutkan lagi. Pada saat dihentikan, Persijap Jepara masih unggul 1-0 atas Persela Lamongan lewat gol Rosalvo Junior pada menit ke-37. (ist.antara)

Ancaman Pemerintah Bagi Platform Digital Pelanggar Perlindungan Anak

NEGARA MANA SAJA YANG SUDAH MEMBATASI PENGGUNAAN MEDSOS UNTUK ANAK-ANAK?

Australia

Anak-anak di bawah 16 tahun dilarang mengakses media sosial

Vietnam

Pembatasan waktu bermain game online dan verifikasi identitas pengguna

China

- Anak-anak dilarang menggunakan perangkat digital pada pukul 22.00-06.00.
- Maksimal dua jam per hari untuk remaja berusia 16-18 tahun

Prancis

Akses media sosial untuk anak di bawah 15 tahun wajib diverifikasi orang tua

AS (FLORIDA)

Anak-anak di bawah 14 tahun dilarang memiliki akun media sosial



perlindungan anak di dunia digital yang sekuat negara lain. Karena itu, kita harus menyusun regulasi yang komprehensif," kata Meutya.

Untuk menyusun aturan ini, Komdigi telah menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerhati anak, UNICEF, Save the Children, PSPK, dan kelompok lainnya. "Tim Komdigi sudah bekerja maraton agar aturan ini bisa segera diresmikan. Saat ini sudah dalam tahap akhir dan kemungkinan akan diumumkan langsung oleh Presiden," ungkap Meutya.

Saat ini, regulasi perlindungan anak di dunia digital sudah mencapai lebih dari 90 persen penyelesaian dan siap diumumkan dalam waktu dekat. Komdigi juga tengah melakukan langkah maraton untuk menyelesaikan aturan perlindungan anak di ruang digital. "Kami cukup maraton berusaha menyelesaikan aturan perlindungan anak di ruang digital. Insya Allah sudah di tahap aktif, jadi dalam waktu dekat bisa kita resmikan," tegas Meutya.

9,17% Pengguna Internet 12 Tahun ke Bawah

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebagian generasi post-gen Z atau anak usia di bawah 12 tahun sudah menjadi pengguna internet aktif di Indonesia. Saat ini ada 221 juta orang atau 79,5 persen dari populasi penduduk Indonesia yang sudah terkoneksi internet.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan generasi post-gen Z terlahir di era digital. "Saat ini, 9,17 persen dari pengguna internet berasal dari kelompok usia tersebut," ujarnya.

Menurut Meutya, anak-anak ini tumbuh dengan akses luas ke dunia maya, namun belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Data menunjukkan 22 persen anak-anak tidak menaati durasi berinternet yang ditetapkan oleh orang tua mereka. "Ini mencerminkan betapa besar daya

tarik dunia digital bagi anak-anak, dan tanpa pengawasan, mereka dapat dengan mudah tersesat di ruang digital ini," tuturnya.

Dalam catatan Kominformo, ada 13 persen anak-anak membuat akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Mereka bisa membuat akun tersebut sendiri.

Fenomena soal internet ini yang belakangan mendorong penyusunan aturan pembatasan media sosial untuk anak-anak. Meutya menyatakan penyusunan regulasi itu memasuki tahap akhir dan akan segera diumumkan. "Sudah di atas 90 persen. Jadi dalam waktu dekat bisa kami resmikan," kata dia.

Aturan baru itu, Meutya meneruskan, tidak secara langsung membatasi akses anak-anak terhadap internet, namun memberikan kontrol lebih jauh kepada orang tua dalam hal perizinan. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada sanksi untuk orang tua atau anak. "Sanksi akan diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan ini."

Dia juga menyoroti banyaknya anak-anak yang menjadi korban judi online (judol) dan pornografi. Ia pun menegaskan pihaknya sudah menyiapkan berbagai upaya untuk memberantas judol dan konten pornografi ini.

"Men-takedown saja tidak cukup. Harus ada tindakan-tindakan lainnya dan harus didukung oleh berbagai perusahaan teknologi termasuk Google. Sebagai langkah konkret pemerintah telah memperkuat regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang ITE dengan melakukan penyusunan Tata Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang ini yang sedang atau sudah memasuki tahap akhir," katanya.

Data Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksplorasi atau NCMEC yang berbasis di Amerika menunjukkan, dalam empat tahun

terakhir ada lebih dari 5,5 juta konten pornografi anak di Indonesia.

Sementara riset Indonesia Indicator mencatat, dalam satu semester tahun 2024 saja ada hampir 25 ribu unggahan kekerasan digital pada anak di media sosial.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun terperangkap jeratan judi online.

Beberapa negara menerapkan regulasi untuk mewujudkan ruang digital ramah anak. Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Perlindungan Internet Anak. Korea Selatan memiliki aturan kuat melindungi privasi anak-anak di dunia maya. Sedangkan Australia baru-baru ini membuat aturan melarang anak berusia 16 tahun bermain medsos.

Direktur Kebijakan Publik, Meta Asia Tenggara, Rafael Frankel, mengaku terbuka membahas rancangan aturan baru ini. Meta bersedia berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komdigi, agar aturan yang terbit bisa mengakomodir semua pihak.

Ia menambahkan, Indonesia berpeluang menjadi contoh yang baik dalam penerapan aturan yang memungkinkan anak dan remaja mendapatkan lingkungan yang aman.

"Ada berbagai versi peraturan keselamatan online untuk anak dan remaja yang berlaku di seluruh dunia. Indonesia memiliki peluang untuk benar-benar menetapkan standar yang baik, tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi juga Asia Pasifik, bahkan terus terang secara global," ujarnya.

"Kami belum melihat model yang melakukannya dengan benar. Indonesia memiliki peluang untuk benar-benar memberikan contoh yang positif, dan kami sangat berharap dapat berkolaborasi dengan Komdigi dan seluruh pemerintah, masyarakat sipil, dan yang terpenting, para orang tua Indonesia untuk melakukannya dengan benar," jelas Rafael.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengontrol aktivitas anak di bawah umur di media sosial. Hal ini sudah diterapkan Meta jauh sebelum rancangan 'Aturan Medsos Anak' dibahas. Mereka pernah merilis fitur Parental Supervision Tools di Instagram, dan baru saja merilis Teen Accounts, Instagram khusus pengguna berusia 13-17 tahun yang memiliki pengaturan ketat dengan tujuan menjaga keselamatan remaja di ranah online. (wid, rls, ist/dya)

RUU TNI Disepakati Masuk Prolegnas, DPR Bantah Kembalikan Dwifungsi ABRI

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

Dia membantah RUU TNI dibahas demi membangkitkan kembali dwifungsi ABRI seperti yang berlaku di era Orde Baru. Menurut dia, fenomena masuknya TNI ke dalam institusi sipil tidak bisa disamakan dengan dwifungsi, karena jumlahnya sedikit dibandingkan pada saat Orde Baru.

"[Tapi], ya, sekarang, kan, yang ada beberapa masuk yang masuk, tetapi sedikit sekali, kan. Itu kebutuhan kementerian saja," tutur Adies.

Adies membandingkan dengan keberadaan personel polisi di dalam tubuh pemerintahan yang menurutnya lebih banyak dibandingkan TNI. Dia lantas meminta masyarakat tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Sekarang sedikit sekali kalau kita lihat yang TNI, banyak pensiunan dari kepolisian malah," kata Adies.

Adies Kadir juga membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak. Adies mengklaim surat presiden (Surpres) RUU TNI telah diserahkan ke DPR pada akhir jabatan Presiden Joko Widodo.

"Ini, kan, Surpresnya sudah pernah diajukan zamannya Pak Jokowi sebelum akhir masa jabatan yang kemarin," katanya.

Adies mengatakan keberadaan Surpres baru dalam proses pengajuan RUU TNI masuk Prolegnas tersebut dilakukan karena adanya sejumlah nomenklatur kementerian yang berubah. Oleh karena itu, Adies memandang perlunya Surpres baru untuk RUU TNI tersebut.

"Karena nomenklatur kementerian banyak yang berbeda, jadi diajukan kembali Surpres yang baru," ucap Adies.

Dia menjelaskan dalam aturan RUU TNI akan dibahas mengenai larangan TNI dalam berbisnis yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI, bersama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI.

"Itu, kan, ada dibahas. Kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana, nanti kita lihat. Pasti meminta banyak masukan, ya, kalau bisnis, bisnisnya seperti apa, tgas TNI jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia," kata Adies.

Secara terpisah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menambahkan bahwa dalam RUU TNI akan dibahas mengenai angka pensiun prajurit yang



Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025, Selasa (18/2/2025). (Ist)

sebelumnya 58 menjadi 60 tahun. Hal itu dikarenakan angka pensiun aparatur sipil negara saat ini mencapai 60 tahun.

"Sementara untuk TNI-Polri itu masih 58 tahun. Tentu di TNI juga enggak boleh rata, karena usia pensiun prajurit yang berpangkat bahwa sersan ataupun yang dibawahnya itu kalau enggak salah, kan, usia 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan betul. Nah, ini akan kita sesuaikan, sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," kata Supratman.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menunjuk dirinya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mengawal pembahasan RUU TNI.

"Mestinya ya, mestinya (yang mengawal) adalah Menteri Pertahanan pasti, kemudian Menteri Hukum pasti. Nah seperti biasa Pak Mensesneg juga diminta ikut ngawal," kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa (18/2/2025).

Ruang Gerak Rakyat Terdampak

Terpisah, Imparsial mengkritik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Imparsial menilai RUU ini membuat ruang gerak masyarakat menjadi semakin sempit.

"Berbagai RUU ini dimaksudkan hanya untuk menambah atau memperluas kewenangan masing-masing lembaga. Artinya, jika negara diperkuat atau ditambah kewenangannya, yang akan terdampak adalah rakyat yang ruang gerak akan semakin sempit dan dibatasi," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Dia mengatakan kewenangan lembaga negara tersebut semestinya dibatasi. Selain itu, menurutnya, pengawasan harus diperkuat lagi.

"Seharusnya, kewenangan negara atau pemerintah itu dibatasi atau diperketat, serta diperkuat pengawasannya karena kekuasaan sejati-

nya cenderung untuk disalahgunakan," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya membangun akuntabilitas dan transparansi lembaga. Karena itu, pengawasan begitu penting.

"Yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi (good governance) dengan salah satu cara memperkuat lembaga-lembaga independen yang ada untuk mengawasi mereka," jelasnya.

Awal Mencuat

Pada Juli 2024, Mayjen Nugraha Gumilar yang saat itu menjabat Kepala Pusat Penerangan TNI mengakui usul penghapusan pasal larangan prajurit berbisnis datang dari TNI sendiri.

Dia berkata usul menghapus Pasal 39 huruf c dalam revisi UU TNI karena saat ini, banyak prajurit yang memiliki usaha sampingan.

"Alasannya karena ada prajurit punya usaha sampingan, contoh usaha warung, toko kelontong, ternak ayam dan lain-lain," kata Nugraha, 16 Juli 2024.

Usul itu mencuat dalam acara Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI yang digelar Kemenko Polhukam pada 11 Juli 2024. Dalam rapat, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro menjelaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyurati Menko Polhukam Hadi Tjahjanto agar membahas beberapa pasal lain dalam revisi UU TNI.

Salah satunya adalah pasal 39 huruf c itu. Kresno mencontohkan istrinya yang memiliki usaha warung di rumah. Menurutnya, hal itu membuat dirinya mau tidak mau terlibat dalam kegiatan itu.

"Kalau ini diterapkan maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam bisnis. Istri saya, saya kan pasti mau enggak mau terlibat. Wong, aku nganter belanja dan sebagainya. Terus apakah ini eksis? sekarang, kalau saya diperiksa saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang," ujar Kresno.

Merujuk naskah akademis RUU TNI periode 2019-2024, salah satu materi yang akan diubah yakni batas usia pensiun prajurit TNI akan diperpanjang. Aturan itu tertera dalam Pasal 53 ayat 1. Berikut bunyinya:

1. Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Bintara dan Tamtama.

Sementara dalam Pasal 53 ayat 2, bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Berikut bunyinya:

2. Khusus untuk jabatan fungsional, Prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 53 ayat 3 dan 4, diatur kekhususan bagi prajurit dengan pangkat jenderal bintang empat. Masa dinas jenderal bintang empat bisa diperpanjang 2 kali berdasarkan keputusan presiden. Berikut bunyinya:

○ Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), Prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 (dua) kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

○ Perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan Presiden.

○ Selain perpanjangan usia pensiun, TNI aktif diproyeksikan bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu. Hal tersebut ditambahkan pada ayat (2) Pasal 47.

Berikut bunyi pasal 47 ayat (2) draf UU TNI:

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/ lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

Menurutnya, yang seharusnya dilarang terlibat kegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Tapi kalau prajurit, mau buka warung kelontong aja ndak. Ada driver saya setelah nganter saya. Kebetulan saya mendapat driver supir sekarang ini. Dia selesai magrib, itu kadang-kadang, atau Sabtu-Minggu itu dia ngojek. Dia melakukan bisnis. Masa enggak boleh kayak begitu?" katanya.

Menurut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak bisnis yang dilakukan prajurit semestinya tidak dipersoalkan selama tidak menyalahgunakan kekuatan. Apalagi jika bisnis dilakukan dalam skala kecil.

"Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, apa berbisnis itu? Ya kan? Kalau misalnya jual beli motor atau apa, ya kalau dia belinya benar, tidak menggunakan itu ya. Jadi berbisnis ya bisnis," kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, 16 Juli 2024. (din, rls, ist, wid/dya)

Resmi Tersangka Pemalsuan Dokumen Pagar Laut Tangerang, **Kades Kohod Belum Ditahan**



tersangka dilakukan pihaknya usai melakukan gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal, pada Selasa (18/2/2025).

"Dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini penyidik dan peserta gelar telah sepakat menentukan empat tersangka, dimana keempat tersangka ini terkait pemalsuan, pemalsuan beberapa surat dokumen untuk pemohonan hak bangunan. Mereka antara lain saudara A kepala desa Kohod, Sekdes Kohod, dan dua penerima kuasa," ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Pihaknya belum menahan keempat tersangka karena proses

gelar perkara baru dilakukan hari ini. Keempat tersangka tersebut yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku penerima kuasa dan CE selaku penerima kuasa.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," katanya

Djuhandhani menjelaskan dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Surat palsu itulah yang kemudian digunakan oleh Kepala Desa Kohod dan lainnya untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Djuhandhani mengatakan Arsin kemudian mendapat bantuan dari beberapa oknum pada Kementerian dan Lembaga, hingga akhirnya diterbitkan bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan

laut Desa Kohod.

Dalam kasus ini, Djuhandhani menyebut pihaknya juga telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Ia menjelaskan dari penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (12/2/2025).

Kendati demikian, Djuhandhani enggan membeberkan lebih jauh ihwal identitas pemilik rekening yang disita tersebut. Termasuk jumlah rekening dan nilai keuangan yang berhasil disita itu.

Ia hanya menyebut penyidik tengah berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mendalami aliran dana keuangan dari rekening-rekening tersebut. (wid, ant, rls/dya)



Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut penetapan

Permintaan Maaf 3 Anggota TNI AL Ditolak **Anak Bos Rental yang Ditembak**

JAKARTA-Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan penembakan yang menewaskan bos rental Ilyas Abdul Rahman (48 tahun) di rest area Tol Jakarta-Merak, Selasa (18/2/2025). Tiga pelaku yang merupakan anggota TNI AL ditolak saat mau minta maaf kepada anak korban.

Diketahui, 2 anak Ilyas, Agam Muhamad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberikan kesaksian.

Pada persidangan kali ini, para terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan, ingin menyampaikan permohonan maaf. Hal itu disampaikan melalui tim penasihat hukumnya.

"Mohon izin terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf," kata salah satu penasihat hukum para terdakwa.

"Saksi 1, saksi 2, ini ada permohonan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, mereka... sebelumnya saya tanya setelah kejadian ada ketemu dengan para terdakwa?" tanya Hakim Ketua ke kedua anak Ilyas.

"Tidak ada," jawab salah satu anak Ilyas.

"Baru di sidang ini? ini ada permintaan dari terdakwa dan penasihat hukum bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf. Saya jelaskan permintaan maaf bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ya," kata Hakim Ketua.

"Sekarang saya tanya saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari para terdakwa," sambungnya.

Namun, kedua anak Ilyas menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa tersebut. Mereka meminta agar perkara ini dapat diselesaikan baru dilakukan permintaan maaf.

"Setelah perkara ini selesai baru boleh minta maaf Yang Mulia. Karena korbannya bukan kami saja Yang Mulia saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya yang menjadi korbannya," kata salah satu anak Ilyas.

Majelis Hakim meminta penasihat hukum agar permintaan maaf ini dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan saksi lainnya.

Dalam kesaksiannya, anak

pertama Ilyas, Agam Muhamad Narsudin, mengatakan mobil jenis Honda Brio itu sebelumnya disewakan oleh ayahnya kepada seorang bernama Ajat Supriatna (32 tahun). Saat disewakan, Ajat hanya mendapatkan fotokopi STNK yang diberi stempel. Sementara itu, BPKB dan STNK asli tak diberikan.

"Saat kendaraan diserahkan ke saudara Ajat (AA), STNK hanya fotokopi stempel?" tanya Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

"Iya," jawab Agam.

"BPKB diberikan?" tanya lagi Anggota Majelis Hakim.

"Tidak," ujar Agam.

Mobil yang disewakan kepada Ajat kemudian berpindah tangan kepada ke salah satu terdakwa. Diduga, terdakwa membeli mobil tersebut.

Sementara itu, anak kedua dari Ilyas, Rizky Agam Syahputra,



menyebut terdakwa yang merupakan anggota TNI AL mestinya paham bahwa membeli mobil yang tak dilengkapi dengan surat adalah pelanggaran.

"Perlu diketahui juga ini ada seseorang membeli mobil bodong dan kebetulan orang itu anggota. Jadi harusnya anggota paham betul hukum di Indonesia ini, bahwa orang sipil seperti saya saja tidak mau membeli mobil bodong tidak ada STNK dan surat-surat, ini kenapa terdakwa ini malah berani," kata Rizky. (wid, rls, ant/dya)

Usul Larangan Lunasi DP Haji Pakai Pinjaman Bank

JAKARTA-Komisi VIII DPR RI rapat kerja membahas usulan-usulan aturan yang akan dituangkan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Selasa (18/2/2025).

RUU Haji dan Umrah ini merupakan usul inisiatif Komisi VIII dan masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2025.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP, Ina Ammania, mengusulkan agar diatur larangan calon jemaah untuk melunasi uang muka pendaftaran haji dengan meminjam dari bank.

"Yang mana notabene apabila mereka tidak mampu, jangan pinjam-pinjam, kadang-kadang pinjam bank yang penting untuk DP itu dihalalkan, sedangkan persyaratan pergi haji itu kan bila mampu," kata Ina dalam rapat.

"Bahkan di daerah itu sampai pinjam dan bank juga menyetujui, menawarkan Rp 10-15 juta," lanjutnya.

Ina merincikan kerugian yang bisa didapatkan oleh para calon jemaah jika menggunakan mekanisme peminjaman ke bank untuk biaya panjer haji. Salah satunya membebani pihak keluarga yang ditinggalkan.

"Kalau umpama daftar antreannya agak lama, seandainya enggak ada usulan yang bayar yang akan ditinggalkan, itu yang harus kita pikirkan untuk supaya payung hukumnya ada untuk tidak bisa meminjam di bank untuk tanda jadi uang," katanya.

Untuk itu, Ina mengusulkan agar aturan ini dirincikan dalam RUU yang akan datang. Tujuannya agar tidak membebani masyarakat.

"Nah ini perlu koreksi pak ketua, UU usulan ini supaya enggak membebani masyarakat kalau mereka mau jual harta bendanya mungkin enggak masalah," tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Agama melaporkan sebanyak 49.218 orang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler 1446 Hijriah/2025 Masehi sejak masa pelunasan dibuka pada 14 Februari 2025.

"Alhamdulillah, proses pelunasan biaya haji hingga hari ketiga berjalan lancar. Total ada 49.218 peserta calon haji reguler yang sudah melakukan pelunasan hingga penutupan sore ini," ujar Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Pelunasan Bipih reguler 1446



(Ilustrasi) Perekaman data paspor jemaah haji. (Dok)

Hijriah dibuka dari 14 Februari sampai 14 Maret 2025. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit.

Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Pelunasan dilakukan di Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada jam kerja, mulai pukul 08.00 - 15.00 WIB.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota reguler dan 17.680 kuota khusus. Kuota jemaah calon haji reguler terdiri atas 190.897 orang yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 orang prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing ibadah, dan 1.572 kuota petugas haji daerah.

"Sebanyak 48.086 orang yang berhak lunas tahun ini telah melakukan pelunasan. Selain itu, ada 1.132 orang lanjut usia prioritas yang juga telah melunasi biaya haji reguler," kata Zain.

Sebelumnya, Kemenag telah merilis daftar nama jemaah calon haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Ada dua kriteria jemaah calon haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Pertama, jemaah calon haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Kedua, prioritas jemaah calon haji reguler lanjut usia.

Minta 1 Pembimbing untuk 90 Jemaah

Terpisah, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) meminta agar pemerintah menambah jumlah pembimbing haji guna meningkatkan

kualitas layanan bagi jemaah, khususnya lansia, disabilitas, dan berkebutuhan khusus. Saat ini, satu pembimbing harus mendampingi lebih dari 135 jemaah.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa 135 satu pembimbing. [Tetapi] ada di antara KBIHU itu, ada yang punya jemaah 300, bahkan satu kloter, hanya satu pembimbing. Nah, ini yang perlu saya kira perlu dipertimbangkan," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) KBIHU, KH Sunidja, dalam rapat.

Sunidja meminta agar UU itu direvisi dan dapat mengatur satu orang pembimbing haji dari KBIHU membimbing 90 orang. Menurut dia, dengan membimbing sejumlah tersebut, para pembimbing dari KBIHU dapat mendampingi secara optimal.

"Idealnya satu orang pembimbing mendampingi 45 orang, satu rombongan, ideal, pak. [Tapi] kami menyadari barangkali, karena nanti ini mengambil porsinya jemaah, saya kira setidaknya-tidaknya 90 orang atau dua rombongan dengan satu pembimbing. Agar ini tidak terlalu berat," tukas dia.

Terkait pendamping, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengusulkan agar batasan usia pendamping dan pembimbing haji diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Yang harus dimaktubkan dalam UU ini satu, batas usia pendamping dan pembimbing," kata Ina.

Usulan ini berdasarkan temuan Ina di lapangan saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia menemukan banyak pengawas haji yang usianya sudah lanjut, bahkan lebih tua dari jemaah yang diawasi.

"Ternyata pas saya tanya umurnya berapa Pak, 76 (tahun). Mungkin itu

BESARAN BIPIH JAMAAH HAJI:

- a. Embarkasi Aceh sebesar **Rp46.922.333,00**
- b. Embarkasi Medan sebesar **Rp47.976.531,00**
- c. Embarkasi Batam sebesar **Rp54.331.751,00**
- d. Embarkasi Padang sebesar **Rp51.781.751,00**
- e. Embarkasi Palembang sebesar **Rp54.411.751,00**
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar **Rp58.875.751,00**
- g. Embarkasi Solo sebesar **Rp55.478.501,00**
- h. Embarkasi Surabaya sebesar **Rp60.955.751,00**
- i. Embarkasi Balikpapan sebesar **Rp57.235.421,00**
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar **Rp59.331.751,00**
- k. Embarkasi Makassar sebesar **Rp57.670.921,00**
- l. Embarkasi Lombok sebesar **Rp56.764.801,00**
- m. Embarkasi Kertajati sebesar **Rp58.875.751,00**

masuk di UU, karena enggak ada UU-nya, boleh ini pendamping ini lebih tua ini yang penting dapat kuota untuk berangkat haji," kata politikus PDIP itu.

Ina mengingatkan agar para pengawas tau diri dengan kondisi usia dan kesehatan.

"Kita ini juga harus paham, Pak, kodrat kita kalau umpama sudah usia 70-75 onderdil mobil aja perlu perbaikan, Pak, servis. Oleh sebab itu enggak mungkin selincih anak-anak muda usia 30-40 (tahun)," katanya. (din, rls, ist, ant/dya)

Berat Biaya Revitalisasi Pasar Lawang, Pemkab Malang Minta Bantuan Pusat

MALANG - Rencana revitalisasi Pasar Lawang di Kabupaten Malang menghadapi kendala akibat beratnya biaya yang harus dikeluarkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, menghitung sedikitnya diperlukan dana Rp 180 miliar.

Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berupaya mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Agar rencana revitalisasi pasar tersebut dapat segera terlaksana.

"Sebenarnya memang kondisi pasar kita sudah banyak yang tidak representatif.

Pasar tradisional di Kabupaten Malang ini kan ada 34 totalnya. Cuma kalau revitalisasi kan anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Jadi kalau untuk itu kami masih mencoba mengusulkan ke pusat," ujar Fuad, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, Pasar Lawang menjadi prioritas utama karena kondisinya yang paling mendesak untuk segera diperbaiki. Fuad menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk revitalisasi pasar ini mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi berdasarkan hitungan terakhir dengan PUPR dan kementerian perdagangan, itu sekitar Rp 180 miliar. Dulu awalnya memang Rp 120 miliar, berkembang menjadi Rp 160 miliar, sekarang hitungan akhir di Rp 180 miliar. Karena ada perubahan nilai bahan bangunan dan lainnya," jelas Fuad.

Meski telah diusulkan ke pemerintah pusat, Fuad mengaku hingga kini belum ada kejelasan mengenai alokasi anggaran untuk proyek tersebut. "Kami juga sudah coba komunikasi dengan pusat untuk tahun ini belum ada anggaran. Masih kami upayakan (untuk bisa direvitalisasi tahun ini)," tambahnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fuad mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengambil langkah tersebut. "Kami belum mengajukan ke provinsi. Fokus kami saat ini adalah memperjuangkan anggaran dari pusat karena kebutuhan dan skalanya cukup besar," katanya.

Lebih lanjut, terkait opsi pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Fuad menyampaikan hal tersebut sempat menjadi

pertimbangan Pemkab Malang dalam upaya merevitalisasi Pasar Lawang.

Namun, mekanisme KPBU dinilai kurang ideal karena dapat berpotensi membebani pedagang dengan biaya tambahan.

"Kalau KPBU, prinsipnya pemerintah bekerja sama dengan investor, tetapi kita harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kalau menggunakan skema ini, dikhawatirkan ada tambahan biaya sewa atau retribusi yang membebani pedagang. Padahal, kami ingin revitalisasi ini meringankan beban pedagang," terang Fuad.

Sebagai informasi, kebakaran yang melanda Pasar Lawang pada 2019 lalu berdampak besar bagi ratusan pedagang. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 456 pedagang kehilangan kiosnya akibat insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 148 pedagang masih dapat berjualan di



Kondisi pedagang di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. (Santi/Lenteratoday)

lokasi semula, sementara 211 pedagang terpaksa direlokasi karena tidak lagi memiliki tempat berdagang.

Selain itu, sebanyak 97 pedagang harus berjualan di tempat penampungan sementara yang dibangun dari material galvalum. Dari hasil visum bangunan, juga menunjukkan struktur pasar tersebut sudah tidak layak untuk dibangun kembali. Bahkan, bagian atap pasar telah habis dilalap api dalam kebakaran 6 tahun lalu. (Santi/Dya)

Massa Bakar Pagar DPRD Kota Malang, Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran



Gabungan Mahasiswa se Malang Raya geruduk kantor DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang Raya menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Dalam aksi yang berlangsung dramatis, mahasiswa secara serentak melakukan tiarap di

tengah jalan sembari menyanyikan lagu 'Tanah Airku'. Peserta aksi juga membakar pagar pintu masuk Gedung DPRD Kota Malang.

Aksi ini sebagai simbol dari ketidakberdayaan rakyat menghadapi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kesejahteraan masyarakat.

Salah satu orator aksi, Danil, dengan suara lantang menyampaikan keresahannya. "Kami cuma bisa tiarap, kami rakyat biasa. Kami tidak mampu. Bagaimana kami, rakyat kecil ini bisa hidup sejahtera kalau semuanya direnggut? Kami mohon ampun, Pak. Jangan siksa rakyat terus, Pak. Kami sudah tidak kuat, kami sudah muak," teriaknya

dengan penuh emosi.

Menurutnya, aksi teatrikal ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam alokasi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Para mahasiswa menyoroti pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut mereka masih belum tepat sasaran.

"Pendidikan yang seharusnya menjadi fundamental, malah dianggap kepentingan sekunder. Di mana uang kami? Ke mana anggaran kami? Ke mana arah program pemerintahan ini?" katanya dengan nada kecewa.

Mewakili para massa aksi, Danil menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menilai kebijakan saat ini lebih berfokus pada

memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia.

"Negara ini benar-benar tidak memanusiakan rakyatnya. Kami menuntut kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan, bukan sekadar memberikan bantuan makanan tanpa memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan yang semakin memburuk," lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang menyampaikan kritik tajam terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa di antaranya bertuliskan "100 Hari Lebih Keadilan Dibunuh," "Pak Prabowo, Sudah, Ya Main-mainnya," dan "Democracy is Corrupt."

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah maupun DPRD Kota Malang terkait tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. (Santi/Dya)

Delta Airlines Terbalik, 18 Orang Terluka



Petugas tanggap darurat beroperasi di sekitar pesawat di landasan pacu setelah kecelakaan pesawat di Bandara Internasional Toronto Pearson di Mississauga, Ontario, Kanada (17/2/2025). REUTERS

KECELAKAAN PESAWAT PADA TAHUN 2025



2 Januari (Tabrakan Pesawat California)

Kecelakaan itu menewaskan 2 orang dan melukai 18 orang.



7 Januari (Perth, Australia)

2 turis asal Swiss dan Denmark tewas dalam kejadian itu, sementara ada 3 korban selamat yang mengalami luka-luka.



28 Januari (Air Busan, Korsel)

7 orang terluka akibat peristiwa itu.



29 Januari (Washington, D.C.)

Total 67 orang tewas dalam insiden ini.



29 Januari (Pesawat Jatuh, Sudan Selatan)

20 orang tewas dan 1 orang selamat dalam kecelakaan itu.



29 Januari (Tabrakan Pesawat dan Helikopter, Washington)

Kecelakaan ini menewaskan 67 orang dan menjadi kecelakaan pesawat paling parah dalam 20 tahun terakhir.



31 Januari (Philadelphia)

Tujuh orang tewas, termasuk enam penumpang di dalam pesawat dan satu orang di dalam mobil yang berada di darat.



6 Februari (Alaska)

10 korban tewas, menurut Departemen Keamanan Publik Alaska.



10 Februari (Arizona)

Dua jet pribadi bertabrakan di Bandara Scottsdale, Arizona, menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya.



17 Februari (Delta Airlines)

18 Orang Terluka dalam kecelakaan ini.

TORONTO - Pesawat Delta Airlines mengalami kecelakaan dan terbalik saat mendarat di Bandara Toronto Pearson, Kanada, pada Senin (17/2/2025).

Kecelakaan yang terjadi di tengah cuaca berangin disertai badai salju itu melukai sedikitnya 18 orang dari 80 orang di dalamnya.

Dari korban terluka, ada tiga orang yang kritis termasuk seorang anak. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters pada Selasa (18/2/2025).

Pihak berwenang Kanada mengatakan, kini sedang dalam penyelidikan untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut yang belum diketahui.

Penumpang John Nelson mengunggah video kejadian di media sosial Facebook, yang memperlihatkan mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke pesawat yang tergeletak terbalik di landasan yang tertutup salju.

Ia kemudian memberi tahu salah satu media massa bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa sebelum mendarat.

"Kami menghantam tanah, dan kami miring, lalu terbalik," kata Nelson kepada jaringan televisi tersebut.

"Saya bisa melepaskan sabuk pengaman dan jatuh serta mendorong diri saya ke tanah. Lalu beberapa orang tergantung dan butuh bantuan untuk turun, namun yang lainnya bisa turun sendiri," imbuh dia.

Bandara Pearson mengatakan

sebelumnya pada Senin (17/2/2025), mereka menghadapi angin kencang dan suhu dingin saat maskapai penerbangan berusaha mengejar ketinggian penerbangan setelah badai salju akhir pekan menumpahkan lebih dari 22 cm salju di bandara.

Pesawat Delta mendarat di Toronto pada pukul 14.13 waktu setempat usai penerbangan selama 86 menit dan berhenti di dekat persimpangan landasan pacu 23 dan landasan pacu 15, menurut situs pelacakan penerbangan FlightRadar24.

"Pesawat itu terbalik dan terbakar," kata seorang petugas darurat kepada menara pengawas lalu lintas udara setelah seorang pengawas memperhatikan bahwa beberapa penumpang berjalan di dekat pesawat yang jatuh itu.

Sementara itu, Deborah Flint, presiden bandara Toronto, mengatakan tidak adanya korban jiwa karena tim penyelamat segera merespons cepat ke lokasi.

"Kami sangat bersyukur tidak ada korban jiwa dan cedera yang relatif ringan," katanya dalam konferensi pers.

Kondisi cuaca yang dilaporkan pada saat kecelakaan mengindikasikan "hembusan angin kencang dan salju yang bertiup," kata situs pelacakan penerbangan.

Kepala Pemadam Kebakaran Toronto Pearson Todd Aitken mengatakan pada Senin malam

landasan pacu kering dan tidak ada kondisi angin samping, tetapi beberapa pilot yang diwawancarai Reuters yang telah melihat video insiden tersebut membantah komentar ini.

Pakar keselamatan penerbangan dan pilot AS John Cox mengatakan ada angin samping rata-rata berkecepatan 19 knot (22 mph) dari kanan saat pesawat mendarat, tetapi ia mencatat ini adalah rata-rata, dan hembusan angin akan naik dan turun.

"Anginnya kencang sehingga mereka harus terus-menerus melakukan penyesuaian kecepatan udara, penyesuaian profil vertikal, dan penyesuaian profil lateral," katanya tentang pilot, seraya menambahkan bahwa "itu hal yang wajar bagi pilot profesional."

Cox mengatakan, penyelidik akan mencoba mencari tahu mengapa sayap kanan terpisah dari pesawat.

Michael J. McCormick, profesor madya manajemen lalu lintas udara di Universitas Aeronautika Embry-Riddle, mengatakan posisi terbalik membuat Delta Airlines kecelakaan itu cukup unik.

"Namun fakta bahwa 80 orang selamat dari peristiwa seperti ini merupakan bukti dari rekayasa dan teknologi, serta latar belakang regulasi yang digunakan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan seseorang benar-benar selamat dari sesuatu yang akan berakibat fatal," terangnya. (Reuters,ist/nei)

Manfaat Daun Sintrong

Atasi Flu hingga Malaria

DAUN sintrong merupakan tanaman herbal yang sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kandungan nutrisinya yang kaya diyakini dapat membantu mengobati berbagai penyakit, seperti flu, malaria, dan diabetes.

Tanaman dengan nama latin *Crassocephalum crepidioides* ini banyak dijumpai di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia.

Daun sintrong memiliki bentuk lonjong dengan ujung lancip dan tepi bergerigi. Daun sintrong biasanya diolah menjadi aneka hidangan, mulai dari lalapan hingga urap.

Namun, dalam pengobatan tradisional, daun sintrong biasanya diolah menjadi teh dan suplemen herbal.

Kandungan daun sintrong

Daun sintrong atau dikenal dengan nama latin *Crassocephalum crepidioides* adalah tanaman herbal yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis.

Tanaman sintrong memiliki batang tebal dan daun berselang-seling dengan bunga berwarna kemerahan. Anda juga akan menjumpai buah berwarna coklat tua di dekat daun ini.

Sintrong mengandung berbagai senyawa antioksidan, seperti flavonoid, saponin, tanin, glikosida, dan steroid.

Masyarakat Indonesia di wilayah Jawa Barat biasa memanfaatkan daun tanaman ini sebagai lalapan. Sementara itu, di Jember, daun ini digunakan sebagai sayuran pecel.

Beragam Manfaat Daun Sintrong untuk Kesehatan

Berkat kandungan nutrisinya yang melimpah, tidak heran ya bila daun sintrong memiliki banyak potensi yang baik untuk kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat daun sintrong yang sayang bila dilewatkan: Mempercepat proses penyembuhan luka

Sebuah penelitian menemukan bahwa daun sintrong dapat mempercepat proses penyembuhan luka.

Manfaat ini berasal dari kandungan vitamin C di dalamnya yang mampu merangsang produksi kolagen, yaitu protein yang berperan penting dalam pembentukan sel kulit baru.

Tak hanya itu, kandungan klorofil dalam daun sintrong juga dapat mengurangi peradangan dan mencegah pertumbuhan bakteri pada luka. Dengan begitu, luka pun akan lebih cepat sembuh.

Mengurangi jerawat

Berkat kandungan senyawa etanol di dalamnya, daun sintrong juga dipercaya dapat mengatasi kulit berjerawat.

Hal ini karena etanol memiliki sifat antibakteri yang mampu memusnahkan bakteri penyebab jerawat, seperti bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan *Propionibacterium acnes*, secara efektif.

Meredakan gejala flu

Jika kamu sedang flu, konsumsi daun sintrong setiap hari sebagai bagian dari perawatan alami bisa kamu coba nih. Pasalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa daun sintrong dapat meredakan gejala flu. Manfaat daun sintrong satu ini diperoleh berkat vitamin C di dalamnya yang dapat mengoptimalkan fungsi sel imun dalam melawan infeksi virus penyebab flu. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas daun sintrong dalam mengatasi gejala flu ya.

Meredakan sakit perut

Sejak dulu, daun sintrong dikenal akan manfaatnya untuk meredakan sakit perut, terutama yang disebabkan oleh keracunan makanan. Ini dibuktikan oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan etanol dalam daun sintrong mampu memusnahkan bakteri penyebab keracunan, terutama *Bacillus cereus*. Dengan begitu, keluhan sakit perut yang diakibatkannya pun dapat mereda.

Mengatasi malaria

Pada pengobatan tradisional, daun sintrong juga seringkali digunakan untuk mengatasi malaria. Manfaat ini diduga berasal dari berbagai kandungan di dalam daun sintrong yang dapat menghambat pertumbuhan parasit penyebab malaria. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk

membuktikan klaim ini.

Mengatasi diabetes

Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa daun sintrong berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat antidiabetes. Ini karena kandungan etanol dalam daun sintrong mampu menurunkan kadar gula darah. Namun, penelitian tersebut baru dilakukan pada hewan percobaan di laboratorium, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya pada manusia.

Meredakan sakit kepala

Daun sintrong ternyata bisa dimanfaatkan untuk meredakan sakit kepala. Kandungan flavonoid di dalam tumbuhan ini berperan aktif sebagai antioksidan yang berpotensi mencegah migrain. Antioksidan membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif dengan menghambat reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh. Reaksi kimia ini bisa memengaruhi sel-sel saraf di otak sehingga menyebabkan migrain.

Membantu melawan radikal bebas

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, daun sintrong kaya akan flavonoid dan vitamin C. Kedua senyawa ini berfungsi sebagai senyawa antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil dan dapat menyebabkan kerusakan sel serta berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kronis. (nei,ist/dya)



Indonesia Kembangkan Teknologi Radiasi untuk Atasi Limbah Plastik

INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah dipilih oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai salah satu negara pilot untuk program NUTEC Plastics. Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi radiasi untuk mengatasi limbah plastik dan memanfaatkannya di sektor industri.

Capaian terkini riset di Indonesia yang dilakukan BRIN bersama mitra industri telah menunjukkan potensi teknologi yang dapat ditingkatkan uji cobanya pada skala komersial. Hal ini akan sangat berharga sebagai referensi negara lain dalam pengelolaan limbah plastik dan pemanfaatannya sebagai bahan baku industri.

Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto mengatakan Indonesia dan banyak negara lain di kawasan menghadapi permasalahan serius dalam penanganan limbah plastik yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan dan memengaruhi kesehatan manusia.

"Pengembangan teknologi untuk mendukung pengelolaan limbah plastik serta pemanfaatannya sebagai bahan baku industri adalah sebuah keniscayaan yang perlu terus didorong," kata Anugerah melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).

Teknologi radiasi, ujarnya, menawarkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan limbah plastik dan menjadikan limbah sebagai bahan baku potensial bagi industri, mendukung pengembangan ekonomi sirkuler.

"Kolaborasi riset dan inovasi



teknologi radiasi untuk modifikasi polimer perlu terus didorong. Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam kolaborasi ini di bawah payung kerja sama teknis IAEA, khususnya dalam kerangka inisiatif NUTEC Plastics," ungkap Anugerah.

Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi radiasi yang telah dikuasai ilmuwan Indonesia, serta aplikasinya untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan baku industri plastik nasional, dapat dijadikan contoh bagi negara lain, khususnya dalam mendorong pengembangan ekonomi sirkuler.

"Pengalaman riset modifikasi polimer dengan menggunakan radiasi, serta kerja sama aplikasinya bersama sektor industri di Indonesia menjadi aset penting untuk mendorong kepemimpinan Indonesia dalam kolaborasi ke depan bersama banyak negara di bawah kerangka kerja sama teknis IAEA, khususnya proyek NUTEC Plastics," kata

Anugerah.

Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri BRIN Tita Puspitasari yang juga National Project Coordinator (NPC) Indonesia untuk proyek RAS1031 mengatakan, BRIN sebagai koordinator pelaksanaan proyek di Indonesia menggandeng berbagai pemangku kepentingan nasional.

Kolaborasi ini menyinergikan pemanfaatan teknologi radiasi untuk mengatasi permasalahan limbah plastik, serta pemanfaatannya sebagai bahan baku industri guna mendukung pengembangan ekonomi sirkuler.

Beberapa kolaborasi di antaranya melibatkan kerja sama dengan PT Polymindo Permata (Viro) untuk riset modifikasi polimer dan aplikasinya pada berbagai produk industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi, utamanya produk wood plastics composite (WPC) dan artificial fiber.

"Proyek riset ini berpotensi

dimanfaatkan lebih luas oleh industri nasional dan juga turut berperan dalam mengatasi limbah plastik yang volumenya terus meningkat, khususnya dengan memanfaatkan fasilitas iradiasi yang dikelola oleh BRIN," kata Tita.

Untuk memfasilitasi pembahasan implementasi proyek kerja sama negara anggota IAEA di Kawasan Asia Pasifik dan Middle East, BRIN bersama IAEA menyelenggarakan Regional Coordination Meeting (RCM) proyek kerja sama teknis RAS1031 bertajuk "Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiation Modification for the Production of Industrial Goods - Phase II", di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin-Jumat, 17-21 Februari 2025.

Pertemuan ini sebagai upaya membentuk jejaring kolaborasi riset dan inovasi dalam pemanfaatan teknik radiasi untuk penanganan limbah plastik, serta mendukung pemanfaatannya sebagai bahan baku industri guna mendorong pengembangan ekonomi sirkuler.

Proyek IAEA ini merupakan bagian dari inisiatif dalam bidang lingkungan yang bertajuk NUTEC Plastics atau Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution.

Pertemuan ini melibatkan partisipasi representatif 11 negara anggota IAEA yang berpartisipasi dalam proyek RAS1031. Melalui proyek ini, IAEA memberikan asistensi kepada negara anggota dalam pengembangan kapasitas dan penguasaan teknologi radiasi yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan limbah plastik dan modifikasinya sebagai bahan baku industri. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Jangan Menunda!

Pentingnya Asuransi bagi Gen Z

BANYAK orang yang baru mempertimbangkan untuk membeli asuransi setelah mereka berkeluarga. Namun, sebenarnya asuransi juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang masih lajang. Menurut Yohan Darmawan, Head of Proposition PT Zurich Topas Life, asuransi juga sangat penting bagi generasi Z yang sedang memulai karier dan belum menikah.

Menurutnya, menggunakan jasa asuransi merupakan salah satu cara dalam menyusun perencanaan keuangan yang baik untuk memproteksi masa depan dari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari semua jenis asuransi, Yohan menyarankan agar para Gen Z mengambil asuransi kesehatan terlebih dahulu. "Biasanya untuk orang yang belum menikah, belum punya keluarga, mungkin yang paling penting adalah diri sendiri dulu. Jadi asuransi kesehatan itu yang paling penting," katanya dalam acara The Launch of Zurich Income Assurance Plan di Nine Table, Jakarta, dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Ia juga menambahkan, apabila sudah bekerja dan sudah mendapat asuransi kesehatan dari kantor, Gen Z pun bisa tetap mendaftarkan asuransi kesehatan untuk dirinya. Ia menjamin hal itu tidak akan membuatnya merugi. "Sekarang tuh banyak banget asuransi yang punya koordinasi benefit, jadi nggak rugi nih punya dua asuransi

karena saling melengkapi dan premi lebih murah," katanya.

Gen Z memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan finansial yang baik sejak dini. Selain itu, Gen Z juga menyadari pentingnya menabung dan investasi, termasuk berasuransi di masa yang akan datang.

Menurut Irvan Hanif Dereindra selaku Investment Communication & Fund Development Allianz Life Indonesia, "Produk asuransi berfungsi untuk mengelola risiko. Pada saat pandemi Covid-19, risiko kehidupan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja dengan konsekuensi yang sangat beragam terhadap kondisi finansial setiap orang. Kepemilikan instrumen finansial yang tepat akan sangat membantu dalam menghadapi risiko serta ketidakpastian dalam kehidupan".

Alasan Gen Z Pentingnya Memiliki Asuransi

Proteksi untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Memiliki asuransi akan sangat membantu dalam mengantisipasi apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, karena hal tersebut bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Asuransi merupakan suatu yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemilik asuransi apabila terkena dampak kerugian tidak terduga seperti kecelakaan, kematian, cacat total, dan keadaan tidak produktif (pensiun),

sehingga sumber penghasilan menjadi hilang. Memiliki asuransi akan memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.

Program Perencanaan Pengelolaan Keuangan Jangka Panjang

Asuransi akan mengurangi risiko kerugian finansial secara baik, dan hal tersebut akan berdampak terhadap perencanaan keuangan yang tetap bisa berjalan efektif.

Apabila memiliki asuransi kesehatan, maka saat jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, asuransi yang menutup biaya tersebut, dan keuangan tidak terganggu. Sebaliknya, apabila belum memiliki asuransi, maka keuangan akan terganggu dan terkuras untuk membiayai pengobatan. Dengan banyaknya aset berharga yang sudah diasuransikan, hal itu membantu Anda mengalokasikan dana untuk hal bermanfaat lainnya, seperti berinvestasi.

Adanya Rasa Aman, Nyaman, dan Tenang untuk Masa Depan

Memiliki asuransi membantu hidup Anda terasa lebih aman, nyaman, dan tenang. Anda mungkin tidak akan khawatir berlebihan bila ada celaka yang menimpa. Perlindungan atau proteksi kesehatan dapat dipakai kapan saja jika dibutuhkan. Dengan memiliki asuransi, tidak perlu lagi takut akan merepotkan keluarga ataupun orang terdekat jika biaya pengobatan ternyata memiliki jumlah yang tidak sedikit.

Biaya Kesehatan yang Makin Mahal

Tahukah kamu kalau biaya kesehatan makin lama akan makin meningkat nilainya? Mungkin penyakit akan datang pada beberapa puluh tahun ke depan, pada saat di mana Gen Z mungkin tidak menyiapkan dana

husus untuk biaya pengobatan. Pada saat itu, biaya pengobatannya cukup besar, tentu akan menguras tabungan yang dimiliki oleh Gen Z.

Meskipun saat ini para Gen Z masih merasa sehat, jangan pernah hiraukan pentingnya asuransi. Dengan adanya asuransi kesehatan misalnya, sekiranya butuh biaya pengobatan yang cukup besar di masa depan, maka akan ada jaminan biaya pengobatan dari pihak asuransi. Memulai asuransi di usia masih muda dan kesehatan masih prima pun biayanya akan lebih terjangkau.

Menghadirkan Rasa Tenang dalam Menyongsong Masa Depan

Keberadaan asuransi akan bisa memberikan Gen Z rasa tenang dan terlindungi saat menyongsong masa depannya. Bagaimana tidak, dengan adanya asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, maka potensi pengeluaran biaya yang cukup besar karena hal-hal yang tidak terduga di masa depan nanti akan bisa dihindari.

Gen Z tidak perlu lagi mengkhawatirkan nanti bagaimana jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya, karena kerugiannya akan dijamin oleh pihak asuransi. (nei,ist/dya)

Huru-hara Danantara ... (dari Hal 1)

PEMERINTAH akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) mendatang. Entitas baru ini didesain untuk mengelola investasi negara melalui konsolidasi aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.

Danantara nantinya akan mengelola tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Aset dikelola Danantara dari BUMN-BUMN tersebut, nilainya diperkirakan mencapai 900 juta dolar AS atau sekitar Rp14.715 triliun aset dalam pengelolaan (asset under management/AUM). Ini menunjukkan skala besar dan pengaruh signifikan Danantara terhadap perekonomian negara.

Kontroversi seputar Danantara, kemudian berkembang. Seruan untuk menarik uang dari bank BUMN menjadi viral setelah isu ini mencuat.

Belakangan, media sosial X dihebohkan dengan ajakan para warganet untuk menarik uang mereka dari bank BUMN.

Seruan ini muncul setelah isu tentang Danantara, badan pengelola investasi yang direncanakan diluncurkan oleh pemerintah, menjadi viral.

Beberapa pengguna media sosial bahkan membandingkan potensi Danantara dengan skandal keuangan besar seperti 1MDB yang terjadi di Malaysia.

Sejumlah warganet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan Danantara. Seorang pengguna dengan akun @yudha*** berpendapat bahwa pemerintah telah ceroboh dalam mengelola masalah ini, yang kemudian memicu gerakan untuk menarik uang dari bank BUMN.

"Gara-gara pemerintah tolol, berita soal Danantara malah jadi aksi 'tarik duit di bank BUMN,'" cuitnya.

Sementara itu, akun lainnya, @grebekwar***, memberikan saran agar orang-orang yang memiliki rekening di bank BUMN segera memindahkan dananya ke rekening baru untuk menghindari biaya administrasi.

"Yang payroll-nya pakai bank BUMN: bikin rekening lagi dan tarik semua uang lu ke rekening itu saat lu gajian," tulisnya.

Tidak sedikit yang lebih tegas menyerukan langkah drastis. "Yang nyimpan uang di bank BUMN mending run bestie runnnnnn," tulis akun @addict**.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait seruan tarik uang simpanan di bank BUMN ini. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah dibentuk secara strategis oleh pemerintah.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, bisnis Danantara bersifat terbuka untuk kerja sama antara dua perusahaan atau lebih (joint venture).

"Danantara menurut saya suatu

keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah, itu karena mereka bisa joint venture," kata Luhut kepada media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dengan skema kerja sama yang bersifat terbuka. Luhut mematkan pengelolaan bisnis Danantara bersifat terbuka dan efisien. Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir atas risiko yang muncul.

"(Joint venture) membuat perusahaan-perusahaan (Danantara) itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat Dengan jelas. Kan bagus," tegasnya meninggalkan awak media.

Danantara merupakan lembaga super holding yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN dengan nilai kapitalisasi besar. Adapun, fungsi Danantara untuk memfasilitasi investasi asing maupun domestik seperti lembaga Temasek milik Pemerintah Singapura.

Untuk menarik investasi asing, Danantara akan menumbuhkan korporasi milik pemerintah berskala internasional dan membangun sinergi antar korporasi tersebut untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik, kondusif, dan kompetitif secara komersial.

Dana Bukan dari APBN

Terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menyebut dana sebesar Rp300 triliun yang akan masuk Danantara dari efisiensi anggaran bukanlah bagian dari APBN. Ia menyebut nominal tersebut tercipta berkat penghematan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebelumnya.

"Penghematan pertama Rp300 triliun itu terlepas daripada APBN yang Rp3.600 triliun karena itu adalah penghematan-penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada saat terdahulu dengan automatic adjustment yang dilakukan sehingga itu terkumpul Rp300 triliun," jelas Wihadi.

"Kemudian dari investasi nomor satu itu Rp308 triliun. Kalau mengenai masalah dividen BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN dan Rp200 triliun diambil oleh pemerintah. Dan inilah yang dipakai untuk Danantara," ungkapny.

Wihadi menyebut dana hasil dari efisiensi anggaran tidak akan sera merta masuk ke Danantara. Nantinya ada Rp58 triliun yang akan dikembalikan kepada 17 kementerian atau lembaga (K/L).

"Jadi ini saya kira permasalahannya adalah kalau kita melihat dari skema yang diberikan oleh Pak Prabowo Rp308 triliun, maksudnya adalah Rp58 triliun akan dikembalikan lagi kepada 17 K/L. Ini adalah salah satunya adalah program-program daripada makan bergizi gratis, program-program lain Pak Prabowo salah satunya perbaikan-perbaikan sekolah, dan hilirisasi," katanya.

"Jadi ini mesti harus skemanya dilihat. Bukan melihat bahwa seakan-

akan dana yang diefisienkan itu akan dimasukkan ke dalam Danantara. Bukan begitu. Tetapi ada satu langkah-langkah yang memang harus dilakukan dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo," tambahny.

Sementara, Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Erma Rini menyatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) akan berbagi kewenangan. Alasannya, kata Anggia, supaya tidak ada lembaga yang memonopoli perusahaan-perusahaan BUMN.

Menurut Anggia, Kementerian BUMN dan Danantara akan saling berbagi porsi kewenangan dalam pengelolaan BUMN. "Ini karena untuk balancing supaya enggak monopoli, saling check dan recheck," kata Anggia.

Dia menyampaikan keduanya sama-sama berada di bawah presiden. Namun, fungsi masing-masing lembaga akan berbeda. Sementara Kementerian BUMN berwenang sebagai regulator, Danantara akan bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan aset serta dividen BUMN.

Celah Korupsi

Namun, di balik ambisi pemerintah membentuk Danantara, tantangan yang akan dihadapi ke depan rupanya jauh lebih besar. Karena dengan pengelolaan aset dan nilai investasi yang jumbo tersebut, maka celah bagi terjadinya korupsi dan konflik kepentingan di dalam pengelolaan Danantara tidak bisa dihindarkan.

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengamini bahwa pembentukan BPI Danantara memiliki tantangan yang sangat besar. Salah satunya adalah potensi tindak pidana korupsi di dalam pengelolaannya.

Karena disadari atau tidak, ada atau tanpa kehadiran Danantara pun praktik korupsi di BUMN sudah sering. Menurut hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) jumlah kasus korupsi BUMN yang masuk tahap penyidikan mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka selama periode 2016-2021. Total kerugian negara akibat seluruh kasus ini diperkirakan mencapai Rp47,92 triliun.

Tercatat ada 9 kasus korupsi BUMN pada 2016. Kemudian jumlahnya sebanyak 33 kasus pada 2017, menjadi 21 kasus pada 2018, dan 20 kasus pada 2019. Bahkan, selama pandemi COVID-19, kasus korupsi di lingkungan BUMN tidak mereda. Jumlahnya bahkan bertambah menjadi 27 kasus pada 2020. Sedangkan pada 2021 ada 9 kasus korupsi BUMN yang disidik oleh aparat penegak hukum.

"Sehingga perlu perencanaan yang matang agar Danantara bisa menjawab tujuan pembentukannya dan tidak menjadi ladang korupsi baru," ujar Baidul, Selasa (18/2/2025).

Berkaca pada lembaga yang sama

seperti Jiwasraya, Asabri atau lembaga yang serupa di luar negeri seperti 1MDB Malaysia atau Petrobras di Brazil, potensi korupsi sangat besar. Celah korupsi itu terjadi akibat adanya intervensi politik.

Masuknya politik dalam pengambilan kebijakan atau keputusan investasi, dapat mengarah pada penunjukan proyek atau mitra tertentu. Sehingga, dalam hal ini tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan profesionalitas. Akan tetapi lebih karena faktor kepentingan.

Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios), Bara M Setiadi, tak menampik bahwa kehadiran BPI Danantara dapat membuka celah praktik korupsi. Karena jika dilihat dengan modal yang dikonsolidasikan, maka potensi korupsi yang lebih besar akan terjadi.

"Harus disadari juga bahwa dengan modal yang lebih besar dan terpusat moral hazard-nya juga lebih besar," ujar dia kepada Tirto, Selasa (18/2/2025).

Berkaca kepada kasus asuransi Jiwasraya saja misalnya, dengan modal yang lebih kecil justru terdapat korupsi sebesar Rp16,8 triliun. Jika tidak dikelola secara akuntabel dan profesional, maka, potensi korupsi di BPI Danantara bisa jauh lebih besar dan berdampak terhadap keuangan negara.

Implikasinya potensi korupsi BUMN yang tergabung di Danantara juga akan meningkat. Terlebih proses audit terhadap BPI Danantara saat ini dinilai tidak lagi transparan. Karena dalam draft RUU BUMN yang baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan persero akuntan publik ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan bagi perusahaan umum (Perum) akuntan publik ditetapkan oleh Menteri.

Padahal sebelumnya, Amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versi draf paripurna 4 Februari 2025, memberi mandat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa BPI Danantara. Namun demikian, beleid baru yang segera berlaku itu memangkas kewenangan BPK dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

"Audit yang baik dari pihak internal maupun eksternal sangat berperan. Saya rasa harus dilakukan dua audit," ujar Bara.

Audit oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin kepentingan publik dan kinerja dalam pelayanan publik. Sementara audit oleh pihak eksternal swasta dapat diarahkan lebih teknis tentang keuangan, kesehatan perusahaan, serta profitabilitas. Sehingga, lebih transparansi dalam proses audit berjalan.

Senada, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan pembentukan Danantara berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena kedua lembaga tersebut tidak bisa melakukan audit terhadap Danantara. (wid, din, rls, ist, tir, ant/dya)

Akhirnya Impor Gula Lagi, Pemerintah Izinkan 200 Ribu Ton

JAKARTA- Masih hangat diingatan, akhir 2024 pemerintah menyatakan Indonesia tidak lagi melakukan impor untuk komoditas garam konsumsi, gula konsumsi, beras dan jagung untuk pakan ternak pada 2025. Namun, baru memasuki bulan kedua, diputuskan mengimpor gula mentah (raw sugar) sebesar 200 ribu ton sebagai cadangan pangan pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan swasembada pangan berarti kontribusi produksi pangan dari dalam negeri sebesar 90%. Keputusan impor gula diambil lantaran pemerintah melihat gejolak harga gula yang mulai naik, meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

"Kalau swasembada itu artinya kalau produksinya dipenuhi dari lokal 90% sampai 100%. Itu swasembada. Kalau gula selama ini, tahun lalu kan kita mengimpor sekitar 700 ribu ton," kata Arief dikutip Selasa (18/2/2025).

Saat ini stok cadangan gula mencapai 4,5 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan gula konsumsi mencapai 250 ribu ton. Melihat hal itu, Arief memperkirakan stok saat ini hanya mencukupi hingga 5 bulan ke depan.

Dia bilang stok cadangan gula ini akan digelontorkan saat harga gula bergerak naik sembari menunggu panen raya yang jatuh pada April-Mei.

"(Impor gula) ini juga sebagai cadangan pangan pemerintah. Kita 200 ribu ton itu kan nggak sampai 3 minggu kan. Karena kebutuhan kita kan 250 ribu ton sebulan. Jadi untuk cadangan yang sekarang harus dikeluarkan. Karena kalau harga gula hari ini kan naik. Berarti gula yang di stok sekarang ini harus dikeluarkan. Harus, harus dikeluarkan segera sehingga nanti masuk stok baru salah satunya adalah dari panen April dan May," terangnya.

Arief menyebut saat ini harga gula di petani mencapai Rp 15.700/kg. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga sebesar Rp 14.500/kg. Untuk itu, dia menjelaskan pemerintah harus menjaga harga gula di tingkat petani.

Arief juga memastikan raw sugar yang diimpor akan ditujukan untuk gula konsumsi, bukan industri. Kemudian penugasan impornya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, seperti ID Food, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Bulog.

Meski begitu, Arief belum bisa memastikan kapan impor gula masuk ke Indonesia. Sebab, saat ini masih dibahas ke lintas kementerian.

"Biasanya ini perlu waktu memang ya. Perlu waktu karena ini kita selesai



(Ilustrasi) Harga gula yang mulai naik, meskipun produksi dalam negeri mencukupi.dok

dapat risalah. Habis itu baru kita bisa minta mereka bidding penugasan dari Menteri BUMN karena ini BUMN-BUMN di bidang pangan. Nanti Badan Pangan tentunya akan bersama kementerian-kementerian lembaga terkait, termasuk Kemenko Pangan untuk siapkan itu. Tapi nomor satu adalah perlu dicatat adalah kita harus jaga harga gula, harga tebu petani. Nggak boleh harga itu jatuh," jelas dia.

Diprediksi Kuota Membengkak

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memprediksi rencana impor gula sebanyak 200.000 ton tersebut kuotanya masih akan membengkak.

Sebab, berdasarkan pasokan carry over awal tahun 2025 terdapat titik kritis antara bulan Mei sampai dengan Juni tahun ini.

"Sebenarnya dengan keputusan impor 200.000 ton itu masih riskan, saya perkirakan itu mungkin masih akan bertambah," jelas Khudori, Selasa (18/2/2025).

Khudori menyebut, akan ada Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2025.

Momen ini diperkirakan akan

meningkatkan konsumsi gula yang pada umumnya rata-rata mencapai 250.000 ton setiap bulannya menjadi 300.000 ton saat Ramadan dan lebaran.

Sementara, pada saat itu belum memasuki panen raya dan masa giling tebu. Jika pun ada, kata Khudori, jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan gula secara bulanan.

"Produksi besar baru mulai Juni, dan giling tebu menuju gula butuh waktu. Makanya saat pemerintah memutuskan impor 200.000 ton itu sebenarnya masih sedikit riskan," kata dia

Sementara, Ketua Umum Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun mengatakan, soal kekurangan stok gula yang diklaim pemerintah tidaklah benar.

Dia menegaskan stok gula nasional masih sangat mencukupi untuk kebutuhan konsumsi ramadan hingga lebaran. Apalagi, musim giling akan dimulai pada Maret-Juni 2025.

"Impor tidak tepat, stok gula masih sangat cukup untuk musim giling, untuk lebaran aman juga masih aman," ujarnya.

Soemitro merinci hingga akhir

Desember 2024 stok gula mencapai 985.000 ton dan telah didistribusikan dari gudang pabrik gula sebesar 143.000 ton.

Dengan stok yang ada di pedagang dan distributor, Soemitro menyebut, stok gula pada akhir Januari 2024 masih sebanyak 842.000 ton di gudang gula.

"Jika ditambah pasokan dari luar pabrik ini masih sangat cukup sampai dengan musim giling 2025," jelasnya.

Harga Pangan Mulai Melonjak

Berdasarkan pemantauan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas pangan sudah mulai mengalami lonjakan harga di berbagai daerah di minggu kedua Februari 2025.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk selalu mewaspadai kenaikan harga komoditas jelang Ramadan.

Ia pun merinci, kenaikan komoditas yang dimaksud yakni, cabai merah yang harganya terasa 'pedas' di 196 kabupaten/kota, lalu minyak goreng di 166 kabupaten/kota, dan gula pasir di 148 kabupaten/kota.

Lebih lanjut, komoditas yang juga menjadi perhatian yaitu cabai rawit dan bawang putih.

"Kita harus waspada terhadap kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan bawang putih," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

Untuk mengatasi lonjakan harga cabai rawit, Tito mengimbau masyarakat untuk memulai gerakan menanam cabai di halaman rumah mereka.

Ia menjelaskan bahwa cabai adalah tanaman yang mudah untuk dibudidayakan dan cepat panen, meskipun banyak daerah yang masih bergantung pada pasokan dari daerah lain yang memiliki surplus.

Untuk bawang putih, Tito juga mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mencari solusi dalam mencegah kelangkaan menjelang bulan suci Ramadan.

Tito juga menyampaikan bahwa ia akan segera melaporkan hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah kepada Presiden Prabowo Subianto, dan meminta arahan lebih lanjut agar harga komoditas tetap stabil jelang Ramadan dan Lebaran 2025.

"Saya akan melaporkan hasil Rakor Inflasi ini kepada Pak Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut," tutupnya. (din, ant, wid, ist/dya)

